

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN BENTENG TAHUN 2024

### Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Rancangan Awal Renja RKPD Kecamatan Benteng Tahun 2024 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rancangan Awal Renja RKPD Kecamatan Benteng Tahun 2024 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi Kecamatan Benteng.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja RKPD Kecamatan Benteng Tahun 2024 masih banyak keterbatasan meskipun telah bersifat rancangan akhir sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Rancangan Akhir Renja RKPD Kecamatan Benteng Tahun 2024 dapat menjadi pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Benteng, 1 Agustus 2023

CAMAT BENTENG

ANDI MASTATAR,S.Pd.I NIP.19740131 200701 1 014

Pangkat: Pembina

# Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas danFungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V. PENUTUP	23
Lampiran	24

# Daftar Tabel

Tabel	2.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja	
		Kecamatan Benteng	15
Tabel	3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	
		Kecamatan Benteng dan Keterkaitannya Dengan	
		Pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten	
		Kepulauan Selayar Tahun 2024	19

# Daftar Gambar

Gambar  $\,$  1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan  $\dots 2$ 

### BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

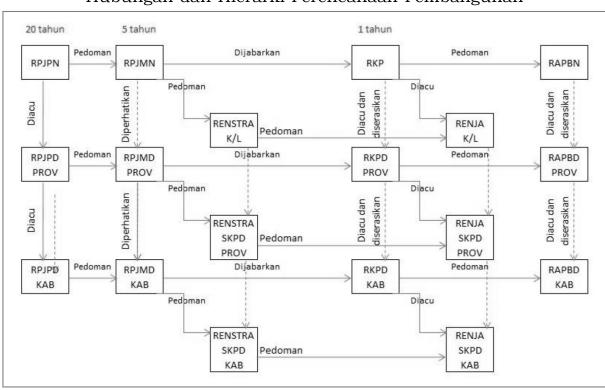
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang HasilVerifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Benteng Renja 2024 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Kepulauan Selayar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024. Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



**Gambar 1.1** Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

### a) Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Benteng, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Benteng, yang menyangkut aspek:

1) Kondisi pelayanan Kecamatan Benteng;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Benteng;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Benteng tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Benteng;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Benteng;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Benteng;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Benteng; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Benteng.

### b) Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Benteng;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Benteng adalah :

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Benteng.
- Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Benteng untuk kondisi tahun 2021-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Benteng.

# c) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Benteng tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Benteng;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerjayang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjayang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Benteng. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab tersebut. *Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Benteng dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Benteng tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Benteng;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Benteng dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Benteng sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

# d) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Benteng tahun sebelumnya, sertacapaian kinerja Renstra Kecamatan Benteng Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Benteng dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Benteng;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng;
- Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Benteng;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

### e) Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Gedangan. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum didalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

### f) Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Benteng.

### g) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Benteng. Namun dalam proses ini Kecamatan Benteng mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Benteng terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

### h) Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng dalam pembangunan daerah.

### i) Penyajian awal dokumen renja Kecamatan Benteng;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Benteng merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

### j) Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

### k) Penyempurnaan Renja Kecamatan Benteng;

Penyempurnaan Renja Kecamatan Benteng perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

### l) Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Kecamatan Benteng dengan saran dan masukan dari tim *desk* Renja Perangkat Daerah.

# m) Penyesuaian dokumen Renja Kecamatan Benteng dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Kecamatan Benteng yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan Forum Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Dearah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2021 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 87 Tahun 2020 tentang kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Benteng Kabupaten kepulauan Selayar dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Benteng untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Benteng.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2) Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Benteng selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024 sesuai penjabaran Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026;
- 3) Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masingmasing program dan kegiatan Kecamatan Benteng Tahun 2024;
- 4) Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Benteng Tahun 2024; dan
- 5) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan Benteng Tahun 2024.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

# 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Benteng Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Benteng sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Benteng 2021-2026 telah dapat diketahui.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Benteng di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Benteng berupa:

- 1. Capaian kinerja program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

# 2.2.1 Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan/Kelurahan dan Desa

Sebagaimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Benteng sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenengan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Capaian indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan Benteng pada tahun 2022 sebesar 95%.Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

# 2.2.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai. Kecamatan Benteng sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dilakukan pengukuran sesuai dengan Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026.

Capaian indikator partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan Benteng pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 90%.

### 2.2.3 Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk efisiensi meningkatkan dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organissi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasikementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Kecamatan Benteng sebagai salah satu perangkat daerah juga menetapkan Nilai RB sebagai salah satu indikator kinerja sebagaimana tertuang didalam dokumen Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja Nilai RB Kecamatan Benteng pada tahun 2022 sebesar 33,99%, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 27,22%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

### 2.2.4 Penurunan Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan

Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas 200 artinya dalam 100.000 penduduk, terdapat 200 penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan dalam 1 tahun. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas diantaranya adalah Pertentangan dan persaingan. Perbedaan ideologi politik. Kepadatan dan komposisi penduduk. Kecamatan Benteng dalam Upaya yang dilakukan untuk mengatasi semakin maraknya kriminalitas juga mencakup peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial, ekonomi, dan pendidikan, peningkatan kerja sama internasional.

Capaian indikator Penurunan kasus kriminalitas di tingkat Kecamatan Benteng pada tahun 2022 sebesar 100% capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

### 2.2.5 Urusan Pemerintah Desa yang Mendukung Pemerintahan

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepulauan Selayar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kepulauan selayar.

Capaian indikator kinerja Persentase urusan pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah Kecamatan Benteng pada tahun 2022 sebesar 98%, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

Guna mengetahui gambaran kinerja perangkat daerah Kecamatan Benteng secara keseluruhan ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel. 2.2**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kecamatan Benteng

No.	Indikator Kinerja	Satuan	20	21	2022		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Peningktakan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	30	30	35	25	
2	Peningktan partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	%	100	100	100	98	
3	Penurunan Kasus Kriminalitas di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	
4	Program Pemerintahan Desa yang mendukung Program Pemerintah	%	45	97	50	98	

# 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Benteng maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepulauan Selayar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kepulauan selayar.
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- c. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Benteng tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Benteng

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan dan bukan oleh Kecamatan Benteng.

Namun dalam proses ini Kecamatan Benteng mempunyai peran yangsangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam *desk* perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Gedangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

# 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada Tabel berikut:

		PRIORITAS
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULSEL	KABUPATEN
		KEPULAUAN SELAYAR
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peningkatan investasi sektor unggulan daerah Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasisi potensi desa
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;	Peningkatan derajat hidup manusia yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana.	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
- 2) Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 3) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan di Wilayah Kecamatan Benteng.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024 ini adalah dalam rangka :

- Meningktakan Kwalitas pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka melaksanakan kegiatan khususnya pelayanan publik di tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP); dan
- 2) Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi atas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Benteng Tahun 2021-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

### 3.3 Program dan Kegiatan.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten demi terwujudnya visi misi Kabupaten Kepulauan selayar serta dampaknya terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals).Secara garis besar, uraian program/kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel T.C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD: Kecamatan Benteng

							Re	ncana Tahun 20	24 (Tahun Rencana	)		Perkiraan Maj	Perkiraan Maju RencanaTahun 2025		
	1	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	/pagu Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		(1)			(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian kinerja Kecamatan Benteng %	Kec.	70,53%	3.726.193.716,00			70,53%	3.769.411.964,00		
-					DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Benteng(%)	Benteng	88%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			88%	·		
7	01	01	2.0	1	Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Benteng	100%	31.000.000,00	3		100%	40.000.000,00		
7	01	01	2.0	1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	7.000.000,000	3		5 Dokumen	10.000.000,00		
7	01	01	2.0	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0	0 3		1 Dokumen	0		
7	01	01	2.0	1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	7.000.000,00	3		2 Dokumen	10.000.000,00		

7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	0	3	1 Dokumen	0
7	01	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		1 Dokumen	0	3	1 Dokumen	0
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 laporan	10.000.000,00	3	2 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	7.000.000,00	3	3 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.139.817.984,00	3	100%	3.141.618.000,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	3.136.817.984,00	3	12 Bulan	3.136.618.000,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3.000.000,00	3	1 Dokumen	5.000.000,00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dokumen	0	3	Dokumen	0
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Benteng	100%	12.000.000,00	3	100%	17.000.000,00

7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	6.000.000,00	3	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	6.000.000,00	3	1 Laporan	7.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Benteng	100%	30.000.000,00	3	100%	35.000.000,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan		0 Peket	30.000.000,00	3	1 Dokumen	35.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Benteng	100%	66.520.000,00	3	100%	90.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		O paket	0	3	0 Paket	15.000.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6000 Paket	3.000.000,00	3	6000 Paket	5.000.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	8.520.000,00	3	0 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	55.000.000,00	3	0 laporan	60.000.000,00
7	01	01	2.06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanTersedianya Meubel padaKantor Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Benteng	100%	114.304.500,00	3	100%	65.000.000,00

7	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan		1 Unit	28.767.000,00	3	1 Unit	35.000.000,00
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0,00	3	0 Unit	0,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yangDisediakan		5 Unit	30.000.000,00	3	5 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	55.537.500,00	3	1 Unit	0
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00	3	0 Unit	0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Benteng	100%	278.577.232,00	3	100%	285.793.964,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	23.539.132,00	3	3 Laporan	25.000.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	255.038.100,00	3	12 laporan	260.793.964,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Benteng	100%	53.974.000,00	3	100%	95.000.000,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	38.630.000,00	3	7 Unit	60.000.000,00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yangDipelihara		5 Unit	0,00	3	5 Unit	10.000.000,00

_								•	_	ī	T		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0,00	3		0 Unit	0,00
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnyayang Dipelihara		2 Unit	0,00	3		2 Unit	10.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	15.344.000,00	3		1 Unit	15.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			31.171.600,00	3			31.919.693,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggaran (%)	Kec.Benteng	0	0	3		0	0
7	01	02	2.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimaldi Wilayah Kecamatan		0 Laporan	0,00	3		0 Laporan	0,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamata		2 Laporan	0,00	3		2 Laporan	0,00
7	01	02	2.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan (%)	Kec.Benteng	100%	31.171.600,00	3		100%	31.919.693,00
7	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan		1 laporan	31.171.600,00	3		1 laporan	31.919.693,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)		100%	20.781.100,00	3		100%	21.279.795,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	Kec.Benteng	100%	20.781.100,00	3		100%	21.279.795,00

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga K emasyaraka tan	10.781.100,00	3		3 Lembaga K emasyarakatan	11.279.795,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00	3	2	Dokumen	10.000.000,00
7	01	03	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	3		1 Laporan	0,00
7	01	03	2.01		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0,00		1	. Laporan	0,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	100 %	66.000.000,00	3		100 %	56.425.474,00
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100 %	66.000.000,00	3		100 %	56.425.474,00
7	01	04	2.03	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.000.000,00	3		1 Laporan	26.000.000,00
7	01	04	2.03		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00	3		1 Laporan	30.425.474,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	100 % 2 Kegiatan 1 Kegiatan	31.500.300,00	3		0%	31.919.693,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	100 % 2 Kegiatan 1 Kegiatan	31.500.300,00	3		100 % 2 Kegiatan 1 Kegiatan	31.919.693,00

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memamtapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	16.000.300,00	3	30 Orang	15.919.693,00
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanKerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	15.500.000,00	3	50 Orang	16.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	-	11.600.000,00	3	-	11.884.632,00
7	01	06	2.01		Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	11.600.000,00	3	-	11.884.632,00
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	 2 Dokumen	11.600.000,00	3	 2 Dokumen	11.884.632,00
	•		Ü	JUM	LAH			3.887.246.716,00			3.922.841.251,00

### **BAB IV**

# RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Kecamatan Benteng Tahun 2024

	(1)			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiata/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		(1)			(1)	(3)	(5)	(6)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME	Persentase capaian kinerja Kecamatan Benteng %	70,53%	3.726.193.716,00
					RINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Benteng(%)	88%	
7	0	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	31.000.000,00
7	0 1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.000.000,000
7	0 1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0
7	0 1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.000.000,00
7	0 1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0
7	0 1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0
7	0 1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.000.000,00
7	0 1	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.139.817.984,00

7	0 1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.136.817.984,00
7	0	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00
7	0	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0
7	0 1	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	12.000.000,00
7	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00
7	0 1	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.000.000,00
7	0 1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30.000.000,00
7	0	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Peket	30.000.000,00
7	0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	66.520.000,00
7	01	01	2.06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	O paket	0
7	0	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6000 Paket	3.000.000,00
7	0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	8.520.000,00
7	0	01	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	55.000.000,00
7	01	01	2.06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Meubel pada Kantor Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	114.304.500,00
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan	1 Unit	28.767.000,00
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.537.500,00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan	0 Unit	0,00

7	0 1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	278.577.232,00
7	0 1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	23.539.132,00
7	0	01	2.08	04	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.038.100,00
7	0 1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	53.974.000,00
7	0 1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	38.630.000,00
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yangDipelihara	5 Unit	0,00
7	0 1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnyayang Dipelihara	2 Unit	0,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.344.000,00
7	0 1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		31.171.600,00
7	0 1	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggaran (%)	0	0
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimaldi Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0,00
7	0 1	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamata	2 Laporan	0,00
7	0 1	02	2.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan (%)	100%	31.171.600,00
7	0 1	02	2.02	03	Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	1 laporan	31.171.600,00
7	0	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100%	20.781.100,00
7	0	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	100%	20.781.100,00
7	0	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.781.100,00
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00

7	0	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00
7	01	03	2.01	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	0,00
7	0 1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	100 %	66.000.000,00
7	0 1	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100 %	66.000.000,00
7	0 1	04	2.03	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.000.000,00
7	0	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00
7	0	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di	100 % 2 Kegiatan	31.500.300,00
	1				URUSAN	tingkat kecamatan (%)	1 Kegiatan	
					PEMERINTAHAN UMUM		100 %	31.500.300,00
7	0 1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	2 Kegiatan 1 Kegiatan	31.500.300,00
7	0 1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memamtapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	16.000.300,00
7	0 1	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanKerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	15.500.000,00
7	0	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	-	11.600.000,00
7	0 1	06	2.01		Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	11.600.000,00
7	0	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	11.600.000,00
		1	JU	MLA	H			3.887.246.716,00

### BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Benteng untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Awal Kecamatan Benteng Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Benteng itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Gedangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Awal Kecamatan Benteng Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Kepulauan Selayar sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Awal Kecamatan Benteng Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Benteng, 1 Agustus 2023

CAMAT BENTENG

ANDI MASTATAR,S.Pd.I NIP.19740131 200701 1 014

Pangkat: Pembina

L A P I R A N Rancangan Akhir Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Benteng Tahun 2024

# Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

# Kab. Kepulauan Selayar

## **Tahun 2024**

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BENTENG

Sub Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN BENTENG UTARA

				. 7.01.0.00.0.00.0 1.0003 KELOTO 1171	Indikator		Renca	na Tahun 2024			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun
		Ко	de	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Program/Kegiat an	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	0	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	rapat Koordinasi dan	Kepulauan Selayar,	100%		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		100%	205,000,000.00
7	0	01	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah SPPD Dalam Daerah		400 Kali	19,950,000.00				22,000,000.00
7	0 1	01	2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Laporan Penyelenggara an Rapat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Utara	400 Laporan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		400 Laporan	22,000,000.00
7	0	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Jumlah Ketersediaan		12 Bulan	174,647,401.00			12 Bulan	183,000,000.00

1   8   Sumber Daya Air dan Listrik	01 2	2 ∩	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,			l l		Γ		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.			10002	The state of the s							
Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik yang disediakan  7 0 01 2.0 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 03 1 2.0 MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN  7 0 03 1 1 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Laporan Kepulauan Selayar, Benteng, Umum Kantor yang Disediakan  7 0 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang	°	0		Sumber Daya Ali dan Listrik							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik yang disediakan  7 0 0 12 2.0 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 0 03  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 1 1 Kali Kab. Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng, Benteng, Benteng, Benteng Utara  1,702,031,870.00  1,781  1 Kali 1 5,000,000.00  1 Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							12 Laporan			12 Laporan	23,000,000.00
September   Sept						· ·			_		
Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik yang disediakan  7 0 01 2.0 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Vang Disediakan  7 0 0 3  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 0 3 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  Romunikasi, Sumbar Daya Benteng Utara Salayar, Benteng Utara Selayar, Ben					· ·	-			_		
Sumbar Daya Air dan Listrik yang disediakan  7 0 01 2.0 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Repulauan Selayar, Benteng, Disediakan  7 0 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang					Jasa	Benteng,			Kelurahan		
Air dan Listrik yang disediakan  7 0 01 2.0 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum  1 0 8 8 Kantor  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 0 03  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyediaan Desa Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Penyedia					Komunikasi,	Benteng Utara					
yang disediakan  7 0 01 2.0 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kab. Selayar, Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 0 3 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan I Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang					Sumbar Daya						
Total Control of the Control of th					Air dan Listrik						
7 0 0 03 2.0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 0 0 03 1 1 Desa Pelayanan Umum Desa Pelayanan Umum Desa Pelayanan Umum Dukungan Desa Pelayanan Umum Dukungan Dukungan Dukungan Dukungan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					yang						
1 8 Kantor   Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Benteng Utara   7 0 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   7 0 03 2.0   1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Pendanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   1 1 1   1 1 1   2 1 1   3 2.0 1   4 1 1   5 1 1   6 1 1   7 1 1   8 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1<					disediakan						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 03 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN  7 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 1 1 1 1 Desa  Masyarakata n yang  Disediakan  Jumlah Laporan Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Utara  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00  1,702,031,870.00	01 2.	2.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum							
Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 03 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Nagarakata n yang	8	8		Kantor							
Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 03 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Nagarakata n yang  1					Jumlah	Kab.	12 Laporan	153,840,000.00	DAU Tambahan	12 Laporan	160,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  Tolonom 1					Laporan	Kepulauan	-		Dukungan	-	
Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  7 0 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  7 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  1 Kali 15,000,000.00  1 Kali 18						•			_		
To the first of th					· ·	-					
						•					
						5 11 <b>6</b> 1 11					
1   MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
1   MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN				1.702.031.870.00			1,781,000,000.00
7     0     03     2.0     Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa     Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang     1 Kali     15,000,000.00     15,000,000.00								_,,,			_,,,
7 0 03 2.0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang											
1 Desa Lembaga Kemasyarakata n yang	03 3	2.0	+		lumlah		1 Kali	15 000 000 00		1 Kali	18,000,000.00
Kemasyarakata n yang	JS   Z.	12.0	'	,			1 Kali	15,000,000.00		1 Naii	18,000,000.00
n yang n	1	1		Desa	_						
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
					Berpartisipasi						
dalam Forum											
Musyawarah		L			Musyawarah				<u> </u>		
7 0 03 2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1,097,032,070.00 1,160	03 2.	2.0	)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,097,032,070.00			1,160,000,000.00
	2	2									

7	0	03	2.0		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di							
					Kelurahan							
						masyarakat dalam perencanaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Utara	1 Lembaga Kemasyarak atan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Lembaga k	18,000,000.00
7	0	03	2.0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
						dan Prasarana Kelurahan yang	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Utara	3 Unit		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	3 Unit	830,000,000.00
7	0	03	2.0 2	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						masyarakat atau organisasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Utara	2 Pokmas / Ormas		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Pokmas / 0	330,000,000.00
7	0	03	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			12 Bulan	589,999,800.00		12 Bulan	603,000,000.00
7	0	03	2.0 3	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

					kemasyarakata n	Kepulauan	12 Lembaga Kemasyarak atan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	12 Lembaga Kemasyara katan	580,000,000.00
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
					Laporan Fasilitasi Pengembangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Utara	1 Laporan	20,000,000.00		1 Laporan	23,000,000.00
7	0	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				14,000,000.00			16,000,000.00
7	0	04	2.0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tripikel	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,	1 Laporan	14,000,000.00			16,000,000.00
7	0	04	2.0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							

	ı			1		T	T -		1			
						Jumlah	Kab.	12 Laporan		DAU Tambahan	12 Laporan	16,000,000.00
						•	Kepulauan			Dukungan		
						Sinergitas	Selayar,			Pendanaan Bagi		
						dengan	Benteng,			Kelurahan		
						Kepolisian	Benteng Utara					
						Negara						
						Republik						
						Indonesia,						
						Tentara						
						Nasional						
						Indonesia dan						
						Instansi						
						Vertikal di						
						Wilayah						
						Kecamatan						
7	0	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN				25,000,000.00			27,000,000.00
	1				PENGAWASAN PEMERINTAHAN				, ,			
					DESA							
7	0	06	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan				25,000,000.00			27,000,000.00
	1		1		Koordinasi Pembinaan dan							
					Pengawasan Pemerintahan Desa							
					G							
7	0	06	2.0	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan							
	1		1		Ketenteraman dan Ketertiban							
					Umum							
						Jumlah	Kab.	1 Dokumen	25,000,000.00	DAU Tambahan	1 Dokumen	27,000,000.00
						Dokumen	Kepulauan			Dukungan		
						Fasilitasi dalam	Selayar,			Pendanaan Bagi		
							Benteng,			Kelurahan		
							Benteng Utara					
						an						
						Ketentraman						
						dan Ketertiban						
						Umum						
							i					

ITOTAL			1 025 620 271 00	2.029.000.000.00
TOTAL			1.935.629.271.00	2,029,000,000.00

# Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2024

Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BENTENG

Sub Unit Organisasi: 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN BENTENG SELATAN

					Indikator		Rencana <sup>*</sup>	Tahun 2024			Prakiraan M	aju Rencana Tahun
	K	ode		Urusan / Bidang Urusan / Program	Kinerja		Target			Catatan	Target	Kebutuhan
	K	oue		/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/Ke	Lokasi Output Kegiatan	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Capaian	Dana/Pagu
					giatan		Kinerja				Kinerja	Indikatif (Rp.)
				Administrasi Keuangan Perangkat	Penyusuna	Kab. Kepulauan	1 Dokumen	4.950.000,00	DAU Tambahan		1	7,000,000.00
				Daerah	na	Selayar, Benteng,	Dokumen		Dukungan		Dokumen	
			dokumen		dokumen	Benteng Selatan		Pendanaan		Doku	Dokumen	men
					anggaran				Bagi Kelurahan			
7 01	. 0	2.0						23.640.000,00				23.640.000,00
	1	2										
7 01	0	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	1	2										
					Tunjangan	Kab. Kepulauan	12 bulan	23.640.000,00	DAU Tambahan		12 bulan	23.640.000,00
					Pengelola	Selayar, Benteng,	Orang/bula		Dukungan		Orang/bula	
					Keuangan	Benteng Selatan	n		Pendanaan Bagi Kelurahan		n	
									Refutation			
7 01	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah				7.977.700,00				10,000,000.00
	1	3		pada Perangkat Daerah								
7 01	0	2.0	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan								
	1	3		Laporan Barang Milik Daerah pada								
					Pengelolah	Kab. Kepulauan	12 Laporan	7.977.700,00	DAU Tambahan		12 Laporan	10,000,000.00
					Barang	Selayar, Benteng,	Laporan		Dukungan		Laporan	
					Milik	Benteng Selatan			Pendanaan Bagi			
					Daerah				Kelurahan			

7	01	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.301.800,00			75.000.000,00
7	01	0 1	2.0 6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Penyediaan ATK dan Peralatan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	3 Paket	·	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	3 Paket	50,000,000.00
7	01	0	2.0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	12 Laporan Laporan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	12 Laporan Laporan	30,000,000.00
7	01	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				91.160.800,00			100,000,000.00
7	01	0	2.0 7	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	4 Unit		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4 Unit	100.000.000,00
7	01	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				701.924.250,00			730,000,000.00
7	01	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

						Jasa	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,	12 Laporan		DAU Tambahan Dukungan	12 Laporan	25,000,000.00
						Kantor, Sumber Daya Air dan Listrik	Benteng Selatan			Pendanaan Bagi Kelurahan		
7 (	01		2.0 8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dan Elstint						
						Jasa tenaga pelayanan yang terlibat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	12 Bulan Laporan	,	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	12 Bulan Lar	705,000,000.00
7	01	0	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.720.600,00			125.000.000,00
7 (	01	0	2.0 9		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jasa Pemelihara an alat kantor dan kendaraan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	5 Unit	·	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	5 Unit	30,000,000.00
7	01	0	2.0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

7	01		2.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Unit		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Unit	90,000,000.00
				Transcor draw Bungunum Zummyu	Jasa	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	15 Unit		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	15 Unit	15,000,000.00
7	01	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.584.200,00			25,000,000.00
7	01	0 2	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				20.584.200,00			25,000,000.00
7	01	0 2	2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
					n Urusan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	1 Dokumen Laporan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Dokumen Laporan	25,000,000.00

7	01	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				906.971.510,00			1,032,513,000.00
7	01	l _	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				49.992.000,00			65,000,000.00
7	01	0	2.0 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
					Penyelengg	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	12 Laporan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	12 Lapor	an 65,000,000.00
7	01	0 3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				670.288.100,00			767,500,000.00
7	01	0	2.0 2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
					masyarakat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	1 Laporan Lembaga Kemasyarak atan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Lapora	n Le 17,500,000.00
7	01	0 3	2.0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

					an sarana	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	12 Bulan Uni	·	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	12 Bulan Un	400,000,000.00
7 (	01	0	2.0 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
					aan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	3 Pokmas / Ormas	·	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	3 Pokmas / 0	400,000,000.00
7 (	01	0	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				186.691.410,00			200,000,000.00
7 (	01		2.0 3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
					araan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	4 PKK, LPM,KRT,LP TQ Lembaga Kemasyarak atan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	4 PKK, LPM,KRT,LP TQ Lembaga Kemasyara katan	200,000,000.00
7 (	01	0 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9.600.000,00			15,000,000.00
7 (		0 4	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9.600.000,00			15,000,000.00

7	01	0 4	2.0		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	12 Bulan Laporan		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	12 Bulan Lar	12,000,000.00
7	01	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14.796.000,00			23,000,000.00
7	01	0 5	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				14.796.000,00			23,000,000.00
7	01	0 5	2.0	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
						sumber	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng Selatan	1 Orang		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Orang	23,000,000.00
7	01	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				19.188.500,00			25,000,000.00

7	01	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan				19.188.500,00			25,000,000.00
		6	1		Koordinasi Pembinaan dan							
					Pengawasan Pemerintahan Desa							
7	01	0	2.0	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan							
		6	1		Ketenteraman dan Ketertiban							
					Umum							
						Dana	Kab. Kepulauan	12 Bulan	19.188.500,00	DAU Tambahan	12 Bulan Do	25,000,000.00
						penyelengg	Selayar, Benteng,	Dokumen		Dukungan		
						aran	Benteng Selatan			Pendanaan Bagi		
						keamanan				Kelurahan		
						dan						
						ketertiban						
T	ATC	L							1.975.815.360,00			2,912,000,000.00

# RENCANA KERJA (RENJA ) dan PROGRAM / KEGIATAN KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

#### Nama OPD: KELURAHAN BENTENG

Na	ama	a O.	PD	: KE	LURAHAN BENTENG				Rencana	Tahun 2024		Catatan	Pe		Maju Rencana un 2025
τ	Jrus	san	/Bi	idang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi Capaian Dana/Pagu Sumber Kinerja Indikatif			Penting			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
		1	1		2	3	4		5	6	7	8	9		10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					322,735,800	DAU				275,804,118
7	01	01	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					322,735,800					247,304,118
7	01	01	2.0	08 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Benten g	12	Bulan	34,200,000			12	Bulan	36,000,000
7	01	01	2.0	08 04	Penyediaan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Benten g	1	Tahun	288,535,800			1	Tahun	211,304,118
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe					0					28,500,000
7	01	01	2.09	9 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		3	Unit	0			3	Unit	2,500,000
7	01	01	2.09	9 000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		8	Unit	0			8	Unit	11,000,000
7	01	01	2.09	9 001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penduk	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		1	Paket	0			1	Paket	15,000,000
7	01	03	}		PROGRAM PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					###########	DAU				###########
7	01	03	2.0	01	Koordinasi Pemberdayaan Desa					4,999,600					7,500,000
7	01	03	2.0	01 01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Benten g	1	Tahun	4,999,600			1	Tahun	7,500,000

						In dilute a Kimonia Duamana /	Rencana Tahun 2024					Catatan	Pe	Maju Rencana un 2025	
Uı	usa	<b>n/</b> ]	Bida	ang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	C	Target apaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	C	`arget apaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	010	3 2	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					798,222,718					942,250,000
7	010	3 2	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Benten	1	Tahun	270,000,000			1	Tahun	182,250,000
7	010	3 2	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Kel. Benten g	1	Tahun	528,222,718			1	Tahun	760,000,000
7	010	3 2	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					802,800,000					818,000,000
7	010	3 2	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Benten	12	Bulan	802,800,000			12	Bulan	818,000,000
7	010	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					156,046,000	DAU				0
7	010	4 2	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum				156,046,000					0
7	010	4 2	2.01	01	Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh l	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kel. Benten	1	Laporan	156,046,000			1	Laporan	0
	JUMLAH									###########					###########

2022

Benteng, 4 Agustus 2023

LURAH BENTENG,

0 1,762,068,318 1,762,068,318

### AHMAD ASHAR, S.Sos

Pangkat. Penata

NIP. 19790731200701 1 014